
KAWISTARA

VOLUME 1

No. 1, 21 April 2011

Halaman 1-102

PERTUMBUHAN MEGAURBAN KEDUNGSEPUR

Saratri Wilonoyudho

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
Email: saratri@yahoo.com.

ABSTRACT

Over the last 20 years many urban areas have experienced dramatic growth, as a result of rapid population increase and the transformation of the world economy because of a combination of rapid technological and political change. In the case of Kedungsepur, the area has seen more than twofold growth. Migrants come to the inner zones from both the area's core and elsewhere in the country. Net migration, in many case, contributes as much as two thirds of the population growth in these zones, whereas in the city cores, net migration contributes little to growth. A comprehensive model suggests that urbanization in Kedungsepur is influenced by structural and social demographic factors. Thus, the balance between managing urban discharges to the environment and enhancing environmental resource capacity is the key determinant of sustainability.

Keywords: economic growth, population growth, urbanization, meaurban.

ABSTRAK

Lebih dari 20 tahun banyak kawasan urban yang mengalami pertumbuhan dramatis sebagai hasil dari pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan transformasi ekonomi dunia akibat kombinasi dari perubahan teknologi dan politik. Dalam kasus di Kedungsepur, kawasan dalam didatangi para migran yang datang dari kawasan inti maupun dari pelosok negeri. Migrasi netto dalam banyak kasus memberi kontribusi bagi pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut, sedangkan di kawasan inti migrasi *netto* kecil kontribusinya. Model yang komprehensif disarankan karena pertumbuhan meaurban Kedungsepur dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi yang bersifat struktural dan sosial. Oleh karenanya keseimbangan antara pelaksanaan manajemen lingkungan perkotaan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya lingkungan merupakan kunci utama bagi keberlanjutan di kawasan ini.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, meaurban.

PENGANTAR

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh fenomena pesatnya pertumbuhan megaurban di kawasan ASEAN yang mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan yang luar biasa cepatnya dalam enam dekade terakhir ini. Pertumbuhan dan dinamika penduduk seperti ini terkait dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, yang cenderung membentuk sebuah formasi yang berbentuk "*Extended Metropolitan Region*" (EMR) yang dicirikan oleh pertumbuhan di kota-kota inti yang meluber ke kawasan peri-peri di sekitarnya (Firman, 2003, McGee, 1971 dan 1991). Dalam sebuah studinya, Firman (2003) juga menemukan bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki basis industri, mengalami pertumbuhan penduduk urban yang lebih cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat kabupaten-kabupaten yang terletak di pantai Utara Jawa yang membentang dari Jakarta hingga Semarang melalui Cirebon.

Studi tentang formasi EMR dan hubungan desa-kota di Jawa juga dilakukan oleh Jones (2001), dan McGee (1971 dan 1991). Globalisasi perdagangan, produksi, dan keuangan memunculkan banyak megaurban di Asia Pasifik (Douglass, 1995 dan 2000). Hal yang sama juga ditemukan di banyak negara di Asia lainnya seperti Taiwan (Liu and Tsai, 1991), China (Yixing, 1991) dan, Japan (Ginsburg, 1990 dan Latz, 1991). Dengan kata lain, fenomena EMR merupakan bagian dari urbanisasi di Asia (Lin, 1994). Fenomena megaurban di Indonesia yang mencolok adalah pertumbuhan kawasan *Jabodetabek* (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), *Gerbangkertasusila* (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan *Kedungsepur* (Kendal, Demak, Semarang, Purwodadi).

Pada sisi lain, temuan dari *United Nations* juga mengatakan bahwa penduduk dunia yang tinggal di perkotaan akan tumbuh dari 3 miliar jiwa pada tahun 2003 menjadi sekitar 4,9 miliar jiwa pada tahun 2030, atau dari 48% dari penduduk dunia menjadi 60%. Yang menarik bahwa pertumbuhan

tersebut tidak terjadi di kota-kota besar (*megacity*) sebagaimana selama ini diperkirakan orang, namun justru tumbuh di kota-kota kecil dan menengah (dengan penduduk kurang dari 500.000 jiwa) yang terdapat di negara-negara berkembang (Bremner, 2005). Hanya yang menjadi masalah, pertumbuhan penduduk di perkotaan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan, sehingga di masa depan pertumbuhan kota-kota membutuhkan perencanaan yang lebih baik, terutama dalam mengantisipasi kedatangan kaum migran yang banyak mendiami kampung-kampung kumuh dan liar.

Hal lain yang menarik adalah temuan dari Brown (2002) yang mengkaji pertumbuhan ekonomi Hongaria pasca-peralihan dari sistem sosialisme ke kapitalisme. Sistem kapitalisme ternyata menghasilkan ketidakadilan. Ini terbukti oleh adanya pergerakan penduduk dari perdesaan yang jauh dari kota. Dinamika penduduk yang terjadi di daerah perdesaan ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi. Daerah perdesaan pada tahun 1990-an menjadi tujuan para pendatang dari golongan ekonomi marginal, serta menciptakan sebuah stratifikasi sosial antara desa-kota. Dengan kata lain, dekonsentrasi penduduk di Hongaria boleh jadi bukan mencerminkan perpindahan yang positif untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik ke depan, serta bukan seperti yang terjadi di kebanyakan negara-negara Barat sebagai "*counter-urbanization*", namun lebih sebagai hasil tekanan ekonomi yang memaksa penduduk untuk pindah karena mereka tidak memiliki pilihan hidup yang lain.

Dari latar belakang masalah tersebut tampak bahwa munculnya istilah *Kedungsepur* mengindikasikan bahwa Semarang dan daerah di belakangnya seperti Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Kudus, dan sebagainya bagaikan sebuah "*region based urbanization*". Daerah di belakangnya tersebut setidaknya menjadi satu sistem pertumbuhan regional, yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ini artinya setiap perubahan yang terjadi di Semarang juga akan

berpengaruh terhadap daerah belakangnya, dan sebaliknya. Dari titik pemahaman inilah artikel ini akan mempelajari pertumbuhan dan urbanisasi di daerah di belakang kota Semarang, sehingga muncul pertanyaan penelitian: 1) Bagaimanakah proses perkembangan urbanisasi sehingga terjadi gejala megaurban di kawasan Kedungsepur?; dan 2) Faktor-faktor apa yang menjadi determinan pokok urbanisasi di Kedungsepur?

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan proses terjadinya urbanisasi di Kedungsepur. Dari hasil analisis diharapkan dapat diperoleh kejelasan hubungan antara urbanisasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, politik atau kebijakan pembangunan kota dan perubahan fisik keruangan di Kedungsepur. Dari titik inilah diharapkan dapat diperoleh kejelasan, terutama terkait dengan rekonseptualisasi urbanisasi berlebih yang “khas” dan “kontekstual” Indonesia khususnya di Kedungsepur. Harapan lebih jauh, hasilnya dapat memperkaya teori-teori tentang urbanisasi serta dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Megaurban dan Pertumbuhan Kota

Kedungsepur sebagai “*Extended Metropolitan Region*”, akan menjadi salah satu fenomena kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang luar biasa cepatnya. Menurut berbagai hasil studi, antara tahun 2000-2030, jumlah penduduk dunia akan tumbuh 1,8 % sampai 2 % setahun. Pada tahun 2030, diperkirakan 61 % orang akan hidup di kota. Pada awal abad XX hanya ada 16 kota di dunia yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Namun, sekarang ada sekitar 400 kota di dunia yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih. Dari jumlah itu, 70 % di antaranya ada di negara-negara sedang berkembang (Cohen, 2006). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2007 ini, sejarah manusia dimulai dengan penduduk lebih banyak tinggal di kota. Bahkan pada tahun 2017 diperkirakan, “*urban area*” akan

lebih menonjol jika dibandingkan “*rural area*”. Menurut Cohen (2006) hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan penduduk yang ada di daerah “*rural*”. Diperkirakan dua tahun ke depan pertumbuhan penduduk perdesaan akan menurun dari 3,3 miliar jiwa (2003) menjadi 3,2 miliar jiwa (2030). Kalau pada tahun 1950-an ada sekitar 1,8 milyar orang yang tinggal di perdesaan atau *rural area*, namun pada tahun 2000 jumlah itu menjadi 3,2 miliar jiwa. Pada sisi lain, dalam 30 tahun jumlah penduduk kota bertambah 2 miliar jiwa.

Menurut John Friedmann (dalam Laquian, 2008), tipe-tipe *urban fields* akan melebar ke luar dari batas administratif pusat kota sejauh 100 kilometer, termasuk di wilayah itu adalah bandara kota, lokasi industri baru, pusat rekreasi, sumber air dan saluran pembuangan, pertanian, dan sebagainya. Dalam istilah McGee fenomena kewilayahan seperti itu disebut “*desa kota*”, karena ada percampuran antara karakter kota dan karakter perdesaan yang unik.

Industrialisasi di negara-negara berkembang yang berdampak terhadap dinamika penduduk, merupakan buah dari penetrasi kapitalisme dunia, yang sering disebut globalisasi ekonomi. Menurut Tyner (2002), wilayah Asia adalah wilayah yang paling dramatis terkena pengaruh globalisasi ekonomi. Perubahan struktur sosial ekonomi merupakan harga wajar yang harus dibayar oleh pengaruh seperti ini, seperti perubahan-perubahan pola investasi yang mulai meninggalkan daerah pusat kota untuk dipindahkan ke kawasan pinggiran. Sebagai akibatnya, kawasan pinggiran di kota-kota metropolitan berkembang sangat pesat, yang memunculkan istilah *peri-peri*, *interzone*, atau *outer zone* kawasan kota.

Globalisasi ekonomi menciptakan hubungan kultural antara negara kapitalis inti dengan negara-negara “*hinterland*”-nya (Light, 2001). Fenomena globalisasi ekonomi dunia memunculkan istilah “*global city*”. Kota-kota besar di dunia “dipersatukan” dalam globalisasi kapitalisme melalui internasionalisasi produksi, jasa, dan kapital.yang

dimotori oleh perusahaan transnasional. John Friedmann (dalam Melchert, 2005) mengatakan ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan kota-kota terutama di negara-negara sedang berkembang. Global ekonomi dikomando dan dikontrol dari pusat kapitalisme dunia (Saskia Sassen dalam Melchert, 2005). Dalam bahasa kiasan dapat digambarkan, jika Tokyo, London, New York, dan Paris "bersin-bersin", Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia akan ikut terkena "flu". Menurut Jones (2001), lebih dari separuh megaurban di dunia berada di kawasan Asia. Dua megaurban Jakarta dan Manila berpenduduk hampir sama dengan seluruh penduduk benua Australia

Pertumbuhan kota-kota kecil yang menyatu menjadi megaurban ini nampaknya belum mampu diatasi permasalahannya oleh pemerintah setempat. Menurut Laquian (2008) masalah yang menonjol dalam manajemen kawasan megaurban adalah: (1) tidak terselesaikannya masalah-masalah fisik seperti pembangunan jalan, saluran, perumahan, pembuangan sampah, drainase, dan sebagainya; (2) sedikitnya perencanaan dan perancang kota yang memiliki visi komprehensif yang dapat memadukan antara berbagai kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan, untuk diformulasikan menjadi satu kesatuan dalam merancang dan merencanakan kota; (3) perencanaan dan perancangan wilayah dan kota, dipengaruhi oleh konsep yang masih mendikotomikan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Isu utama pembangunan perdesaan adalah pembangunan pertanian yang modern, terbukanya akses jalan dan pasar untuk hasil-hasil pertanian, reformasi agraria, produktivitas hasil pertanian, mekanisasi pertanian, dan isu-isu kemiskinan lainnya; dan (4) masih belum terkoordinasinya antar-hirarki dan tingkatan institusi dan pemerintahan dalam membangun kota dan daerah, serta fragmentasi sektoral. Berbagai peraturan perundangan dan produk perencanaan tidak lintas sektoral dan lintas batas administratif.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna dari suatu fenomena urbanisasi dengan berbagai sebab dan akibatnya, menggunakan sumber data berupa angka-angka, data atau informasi yang berkaitan hasil survai BPS atau instansi terkait lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini lebih dekat ke arah penelitian kualitatif-kuantitatif (Brannen, 1997). Penelitian kualitatif memiliki karakter (1) bertujuan memperoleh gambaran yang lebih mendalam; (2) bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena; (3) memandang fenomena secara utuh dan holistik; dan (4) desain penelitian bersifat emergensi, artinya terbuka untuk disempurnakan (Nasution, 1988).

Penelitian ini menggunakan *pendekatan kompleks wilayah*. Unit wilayah di Kedungsepur diidentifikasi perbedaan dan persamaannya sesuai tujuan penelitian, atau teknik diferensiasi areal melalui teknik klasifikasi. Wilayah bukan tujuan akhir studi ini (*objective region*) melainkan sebagai alat (*subjective region*) untuk mempelajari kelompok gejala yang ada di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan pengamatan di lapangan. Variabel dari penelitian ini, adalah (1) variabel tergantungan, yaitu urbanisasi; dan (2) variabel bebas, yaitu perubahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika perubahan lingkungan. Berbagai dokumen dan data dianalisis setelah dikaitkan dan digabungkan dengan data lain. Model analisis isi (*content analysis model*) digunakan untuk menganalisis substansi berbagai data dan dokumen. Berbagai data dan analisis tersebut dipadukan dengan model analisis interaktif (*interactive analysis model*).

PEMBAHASAN

Dalam satu dasawarsa 1995-2005 Semarang dan beberapa daerah di belakangnya (Kedungsepur: Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi) mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan yang luar biasa cepatnya. Data pada Tabel 1 menun-

Tabel 1.
Pertumbuhan Penduduk Kota dan Desa Di Kedungsepur Tahun 1995-2005

Daerah	Tahun 1995		Tahun 2005		Laju Pertumbuhan Rata-rata % per Tahun	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Kota Semarang	1.104.405	241.947	1.352.869	85.864	2,05	-9,80
Kabupaten Kendal	201.216	629.804	350.054	557.717	5,69	-1,20
Kabupaten Demak	151.515	735.581	264.142	744.680	5,71	-0,12
Kabupaten Semarang	199.644	607.744	293.047	585.231	3,91	-0,37
Kabupaten Grobogan	186.150	1.007.666	194.938	1.114.408	0,46	1,00
Jawa Tengah	9.459.680	20.193.586	12.903.891	18.992.223	3,15	-0,61

Sumber: BPS Supas 1997-2007

jukkan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan di Kendal dan Demak menunjukkan angka yang paling besar di antara daerah belakang lainnya, yakni masing-masing 5,69 % dan 5,71 %. Pertumbuhan penduduk perkotaan di dua kabupaten ini dapat dipahami karena Kendal dan Demak merupakan rangkaian koridor yang nyaris menjadi satu dengan kota Semarang untuk membentuk megaurban. Pertumbuhan dan dinamika penduduk seperti ini nampaknya terkait dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Ketimpangan Desa-Kota?

Yang menarik, meskipun Kedungsepur tumbuh menjadi "megaurban", namun tidak terjadi ketimpangan antar-wilayah. Pada Tabel 2 terlihat bahwa dari indikator ekonomi maupun indikator sosial, tidak terjadi ketimpangan yang cukup berarti antara kota Semarang dengan daerah di belakangnya. Salah satu kunci pengendalian utama pertumbuhan megaurban adalah memberi perhatian terhadap kota kecil di sekitarnya. Kecenderungan investasi besar yang memusat di kota besar mendorong terjadinya peningkatan primasi dan ketimpangan wilayah. Pertanyaannya apakah kota kecil di sekitar kota Semarang seperti Kendal dan Demak dirugikan atau tidak? Dari Tabel 2 jawabannya cukup tegas yakni tidak terjadi pemusatan kemakmuran di kota Semarang. Diduga hal ini terjadi karena penye-

baran investasi ke kota kecil di sekitarnya berjalan baik. Hal ini nampaknya sejalan dengan gagasan Rondinelli (1984) agar penyebaran pembangunan ke kota-kota yang lebih rendah hirarkinya perlu dilakukan dengan penanaman investasi agar terjadi pemerataan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud kota kecil bukan dalam arti jumlah penduduknya lebih sedikit, namun berdasarkan fungsi yang dimiliki.

Secara umum tidak ada ketimpangan pembangunan antar-wilayah di Kedungsepur tersebut, namun jika mencermati pertumbuhan penduduk kota Semarang (yang merupakan "pusat" dari Kedungsepur), nampaknya pernyataan tersebut harus ditafsirkan hati-hati. Bagaimanapun migrasi yang masuk ke kota Semarang diduga kuat akibat sempitnya lapangan kerja di desa sehingga penduduk desa tetap tertarik bekerja di kota besar seperti Semarang. Secara umum yang dicatat BPS kota Semarang (2008) adalah bahwa selama kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, penduduk yang datang di kota Semarang berturut-turut adalah 34.270 orang pada tahun 2002, selanjutnya 37.063 orang (tahun 2003), 35.105 orang (tahun 2004), 30.910 orang (tahun 2005), dan 42.714 orang pada tahun 2006. Sedangkan 5 kecamatan yang tergolong padat, juga kedatangan penduduk yang cukup banyak pada tahun 2006. Lima kecamatan itu adalah Banyumanik yang kedatangan 4.128 orang,



Gambar 1.
Peta Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi)

Tabel 2.
Indeks Pembangunan antar-Kabupaten di Daerah Kedungsepur Tahun 2008

Indikator	Kota Semarang	Kab.Kendal	Kab.Demak	Kab.Semarang	Kab.Grobogan
A	10.002.209	4.874.444	2.464.338	4.662.296	1.951.803
B	4,46	3,41	3,36	15,38	3,21
C	62,52	76,78	73,42	73,98	75,11
D	27,25	35,81	9,82	43,70	3,17
E	19,71	11,8	13,98	21,8	5,18
F	94,0	38,6	26,2	33,4	14,9
G	1.359 km	678	310	643	486
H	75,9	68,3	70,3	72,2	69,2
I	189.533	107.604	101.048	83.760	166.549
J	16,42	3,5	4,4	5,6	3,4
K	10.402	6.168	15.307	4.547	7.250
L	7.230	113	78	73	63
M	3773	271	229	434	727

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009 (diolah)

Keterangan

Indeks Ekonomi :

- A : Jumlah pendapatan per kapita
- B : Pertumbuhan pendapatan per kapita
- C : Tingkat partisipasi angkatan kerja
- D : Persentase nilai tambah manufaktur terhadap total PDRB Kabupaten/kota
- E : Persentase tenaga kerja manufaktur dibanding total tenaga kerja kabupaten
- F : Persentase penduduk tinggal di kota
- G : Panjang jalan per 10.000 km persegi

Indeks Sosial :

- H : Indeks Pembangunan Manusia
- I : Jumlah murid SD per 1000 murid
- J : Persentase pekerja lulusan akademi/ perguruan tinggi
- K : Rasio guru SD/ 10.000 murid
- L : Rasio dokter/ 10.000 penduduk
- M : Rasio tempat tidur rumah sakit/ 10.000 penduduk

Kecamatan Tembalang 4.136 orang, Kecamatan Pedurungan 6.209 orang, Kecamatan Semarang Barat 4.002 orang dan Kecamatan Ngaliyan 4.059. Lima kecamatan ini berkembang pesat karena aktivitas baru banyak dibangun di wilayah ini seperti pembukaan kampus-kampus baru, pusat perbelanjaan, perumahan, kawasan wisata, industri, dan sebagainya.

Migrasi masuk dapat diduga dari masih adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota hingga terjadi fenomena "urban bias". Dalam sejarah pembangunan di negeri ini, teori kutub pertumbuhan dijadikan paradigmanya. Dalam paradigma ini diasumsikan bahwa ada produk pertanian yang dapat dipacu produktivitasnya sehingga akan mencapai tingkat tertinggi dalam produksi pangan, memperluas kesempatan kerja dan pendapatan pada sebagian besar masyarakat, terutama dalam level subsisten. Dari titik inilah diharapkan tumbuh usaha kecil menengah usaha *farm*, ada pergerakan modal, ada kredit, teknologi dengan riset. Dengan mendorong kerangka institusional di perdesaan, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan regional.

Dalam kenyataannya, strategi kutub pertumbuhan ini tidak cocok di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena ada dualisme antara sektor pertanian dan industri, serta penetrasi kapitalisme global sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya. Pada satu sisi sektor pertanian banyak mengalami hambatan karena lahan pertanian terutama di Jawa sangat sempit serta banyak terjadi *fragmentasi* atau pewarisan. Pada sisi lain, sektor industri sangat padat modal dan berorientasi pada substitusi impor. Kendali teknologi dan pertumbuhan ekonomi praktis berada di negara-negara maju, dan Indonesia hanya sebagai "tukang jahit". Akibatnya hanya tenaga kerja terampil saja yang dapat memasuki sektor industri. Adanya *urban bias* semacam ini mengakibatkan tumbuhnya sektor informal, karena luapan tenaga kerja dari sektor pertanian tidak banyak yang dapat ditampung di sektor industri. Teori-teori dari Boeke (1961) tentang

dualisme sektor ekonomi maupun dari Geertz (1963) tentang involusi pertanian banyak menjelaskan tentang kemiskinan dan peluang kerja di perdesaan.

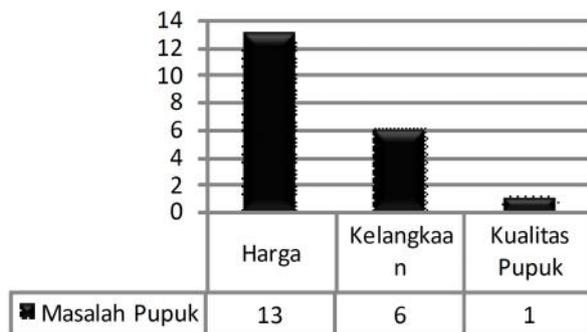
Internasionalisasi atau globalisasi kapital dari negara-negara maju yang dipenetrasikan ke negara-negara berkembang, telah banyak menimbulkan kesulitan bagi para wirausahawan lokal. Membanjirnya produk-produk tekstil dari Cina maupun terperangkapnya Indonesia dalam produksi pangan, menunjukkan bahwa daya ekspor negeri ini masih lemah. Mulai dari hilir sampai hulu, Indonesia masuk dalam perangkap pangan (*food trap*) dari negara-negara maju. Sebagai contoh, industri perbenihan kita dikuasai perusahaan raksasa trans-nasional (MNCs) seperti *Syngenta*, *Monsanto*, *Bayer Crop*, dan sebagainya dengan total nilai 40 miliar US dollar. Demikian pula dalam industri pengolahan pangan, MNCs seperti *Nestle*, *Kraft Food*, *Cargill* dan *Unilever* juga menguasai pangsa pasar dengan nilai 490 miliar US dollar, bahkan di tingkat pengecer pangan, MNCs seperti *Carrefour*, *Wal Mart*, *Tesco* dan *Metro Group* juga menguasainya dengan total nilai sebesar 1.091 miliar US dollar (*Jawapos*, 11/9/2008). Akibatnya petani kita terus terpuruk, karena kedelai, gula, beras, bahkan garam pun harus diimpor.

Studi Kasus Petani di Kabupaten Kendal

Tentang nasib petani yang tidak menguntungkan di daerah *hinterland* kota Semarang, yakni kabupaten Kendal, telah dilakukan sebuah penelitian kecil. Studi kasus ini didukung oleh hasil penelitian di lapangan pada Bulan Juni 2010 yang dibantu oleh para peneliti dari *Dewan Riset Daerah Jawa Tengah*. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kendal (daerah *hinterland* kota Semarang) dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Weleri, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Cepiring, dan Kecamatan Rowosari. Jumlah responden yang diambil adalah 20 orang petani yang terdiri dari 10 orang pemilik, 6 orang petani penyewa, dan

4 orang petani penggarap. Kebanyakan pemilik menggunakan sawahnya untuk dua kali masa tanam dan memberi waktu jeda untuk menyuburkan tanah kembali, sedangkan para penyewa dan penggarap memaksimalkan masa tanam sebanyak tiga kali dengan tujuan mengejar setoran terhadap pemilik sawah tanpa memberikan waktu jeda untuk penyuburan tanah.

Semua responden menanam padi dalam waktu satu tahun. Sebagian besar untuk masa tanam tiga kali mereka menanam padi, jagung dan tembakau, sedangkan untuk masa tanam dua kali mereka hanya menanam padi atau padi dan tembakau. Semua responden di Kendal semuanya menggunakan pupuk kimia dan tidak ada yang menggunakan pupuk kandang. Hal tersebut dikarenakan di wilayah tersebut jarang terdapat pupuk kandang. Pembelian pupuk di Kabupaten Kendal rata-rata dibeli dari toko atau agen yang menjual pupuk di desa masing-masing, hal ini disebabkan di wilayah responden keberadaan kelompok tani belum efektif dan efisien.



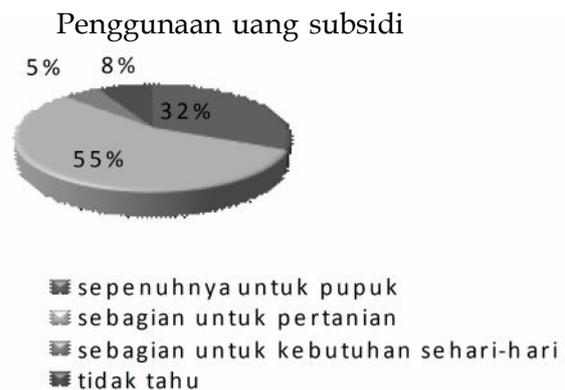
Gambar 2.
Grafik Masalah dalam Memperoleh Pupuk

Sumber: Hasil Wawancara (Juni 2010)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa kehidupan petani umumnya bertanah sempit sehingga produktivitasnya rendah sehingga sebagian dari mereka lebih memilih untuk hutang pupuk pada toko atau agen dan membayarnya hampir dua kali lipat ketika sudah jatuh tempo hutang tersebut. Fakta ini cukup memberi bukti betapa mar-

ginalnya kehidupan para petani berlahan sempit. Para petani di Kabupaten Kendal rata-rata mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Semua responden rata-rata juga mengalami masalah terhadap harga pupuk dan kelangkaan pupuk.

Kesulitan ekonomi yang dialami para petani ditunjukkan oleh rencana mereka jika subsidi pupuk diganti dengan uang. Hampir seluruh responden setuju dengan adanya subsidi langsung berupa uang tunai kepada petani, Lebih dari 50% responden akan menggunakan subsidi tersebut tidak hanya untuk pupuk. Bahkan ada responden yang akan menggunakan subsidi tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hanya 32% responden yang akan menggunakan subsidi tersebut untuk keperluan pupuk.



Gambar 3.

Grafik Rencana para Petani Terkait Pemberian Subsidi Pupuk Berujud Uang

Sumber: Wawancara di Lapangan (Juni 2010)

Urbanisasi sebagai Way of Life

Hasil penelitian lapangan tersebut hanya sekadar menggambarkan betapa lemahnya kehidupan para petani, khususnya di daerah pinggiran kota Semarang. Secara nasional, semakin melemahnya sektor pertanian ditunjukkan oleh data BPS (2003), yakni jumlah petani gurem meningkat 2,6 % per tahun. Yakni dari 10,8 juta petani pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Petani gurem adalah petani berlahan sempit kurang dari 0,25 hektar. Jumlah lahan petani menurun dari 0,5 ha per petani pada tahun 1993 menjadi hanya 0,3 ha per

petani pada tahun 2003. Petani pangan hanya mampu memenuhi 30 % dari kebutuhan keluarganya jika lahan yang diolahnya hanya satu hektar. Padahal, jumlah petani pangan adalah 72 % dari total petani yang ada.

Menurut BPS (2008) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB fluktuatif, namun cenderung menurun. Angka sementara pada semester satu tahun 2008 persentase sektor pertanian berada pada kisaran angka 14 persen yang berarti menurun dari angka 15,46 persen pada tahun 2002. Namun kisah swasembada pangan itu kini juga telah berhenti karena menurut BPS (2008), pada tahun 2007 Indonesia harus mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand, masing-masing senilai 335,6 juta US dollar dan 122,4 juta US dollar. Kalau dilihat besarnya, maka pada tahun 2004 Indonesia mengimpor 250 ribu metrik ton, tahun 2005 sebanyak 225 ribu metrik ton, tahun 2006 sebanyak 495 metrik ton dan melonjak tajam menjadi 1.495 ribu metrik ton pada tahun 2007.

Kondisi pembangunan pertanian di tingkat nasional tersebut nampaknya juga terjadi pula di daerah belakang kota Semarang. Hasil penelitian juga menunjukkan hal yang sangat menarik, yakni di semua kabupaten di daerah belakang kota Semarang, sektor pertanian tidak dapat diharapkan lagi menjadi penopang utama kehidupan di pedesaan. Pernyataan ini didukung oleh fakta sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3 dan tabel 4 bahwa proporsi pekerja bebas di sektor non-pertanian, justru lebih besar dibandingkan dengan proporsi pekerja bebas di sektor pertanian. Jika pekerja sendiri tanpa bantuan orang lain dan pekerja dengan bantuan orang lain yang tidak dibayar disebut sebagai pekerja informal, maka tabel 3 dan tabel 4 juga menunjukkan pekerja sektor informal jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lainnya.

Fenomena tersebut makin meneguhkan sinyalemen yang mengatakan bahwa anak muda dari desa saat ini makin enggan melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani atau buruh tani. Fakta ini

diduga kuat berkaitan dengan semakin membaiknya tingkat pendidikan pemuda desa sehingga mereka lebih merasa cocok kalau bekerja di "kantoran" atau setidaknya yang tidak masuk ke "lumpur" sawah. Data BPS (2009) menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah petani di Kabupaten Demak, yakni dari 302.603 petani pada tahun 1998 menjadi 221.241 petani pada tahun 2008. Kenyataan ini didukung oleh pernyataan para petani di kota Semarang dan daerah belakangnya dalam *Focus Group Discussion (FGD)* di Semarang pada Juli 2010 yang lalu.

Dari titik inilah pemerintah daerah dituntut untuk merespon perubahan besar ini dan berusaha bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki inovasi untuk bekerja secara mandiri. Pada satu sisi memang satu hal yang menggembirakan tumbuhnya jiwa kewirausahaan ini, namun di sisi lain, merosotnya daya tarik sektor pertanian juga harus mendapat perhatian serius. Idealnya industrialisasi atau pertumbuhan sektor jasa terkait erat dengan pertumbuhan dan peningkatan produksi di sektor pertanian. Pemerintah daerah mesti mampu meyakinkan para pemuda desa untuk menekuni sektor pertanian, tentu saja dengan inovasi baru, agar produk pertanian terkait erat dengan industrialisasi dan pertumbuhan sektor jasa. Pemerintah daerah mesti aktif menunjukkan contoh inovasi pertanian terkait dengan agrobisnis yang berorientasi ekspor, sehingga pekerjaan pertanian tidak diidentikkan dengan pekerjaan "kotor" oleh para pemuda yang berpendidikan.

Menurunnya sektor pertanian di satu sisi ternyata tidak diimbangi dengan produktivitas di sektor industri, namun justru yang banyak diciptakan adalah pusat pertumbuhan baru yang berasal dari pemodal besar. Tumbuhnya industri perakitan di pinggiran kota dan tumbuh suburnya jaringan mini-market yang menggusur pasar-pasar tradisional menunjukkan adanya dominasi ekonomi global yang dikendalikan kapitalisme negara-negara maju. Globalisasi ekonomi ini akan mempengaruhi kebijakan

Tabel 3.

Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja Seminggu yang Lalu di kota Semarang dan Daerah Belakangnya Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Tahun 2006

Kota

Daerah	1	2	3	4	5	6	7	Jumlah
Kota Semarang	135.002	47.731	29.559	364.526	3.207	13.428	27.240	620.688
Kabupaten Kendal	30.120	33.642	8.859	63.962	10.518	15.302	24.014	186.417
Kabupaten Demak	30.802	24.460	2.100	68.035	2.494	8.410	7.976	144.277
Kabupaten Semarang	33.138	17.890	7.906	80.393	1.620	4.643	7.690	153.280
<i>Kabupaten Grobogan</i>	25.204	21.542	3.114	24.650	506	5.279	14.859	95.154

Sumber: BPS Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 2007

Tabel 4.

Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja Seminggu yang Lalu di kota Semarang dan Daerah Belakangnya Menurut Status Pekerjaan Utama di Desa Tahun 2006

Desa

Daerah	1	2	3	4	5	6	7	Jumlah
Kota Semarang	9.408	2.779	1.119	22.190	1.926	2.741	1.482	42.365
Kabupaten Kendal	33.479	97.914	3.977	42.537	56.258	90.024	88.599	342.788
Kabupaten Demak	62.324	101.338	4.832	64.793	42.564	40.962	68.763	385.576
Kabupaten Semarang	52.019	77.165	7.424	79.697	13.645	15.271	72.648	317.899
<i>Kabupaten Grobogan</i>	74.061	233.027	2.927	66.050	31.400	49.725	176.001	633.191

Sumber: BPS Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 2007

Keterangan :

1. Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang lain
2. Berusaha Sendiri Dibantu Buruh Tetap/Tidak Dibayar
3. Berusaha Sendiri Dibantu Buruh Tetap/ Dibayar
4. Buruh/Karyawan/Pegawai
5. Pekerja Bebas di Pertanian
6. Pekerja Bebas di Non-Pertanian
7. Pekerja Tidak Dibayar

makro-ekonomi yang mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor. Dari titik inilah pertumbuhan kota terus terjadi sehingga kota menjadi daya tarik bagi lokasi kegiatan usaha karena adanya kepentingan ekonomi skala besar dan ekonomi aglomerasi yang menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Proses industrialisasi ini akan terus mempengaruhi transformasi struktur sosial. Para pekerja industri dan tenaga profesional sebagai kelas baru, dan para kaum migran dari desa yang tidak memiliki keterampilan, terus tumbuh di kota-kota besar. Oleh karena itu, kaum migran pada umumnya berketerampilan rendah, maka mereka "terlempar" di sektor informal dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi.

Fakta ini cukup menarik terutama jika

dikaitkan dengan istilah *urbanism as a way of life* sebagaimana dipopulerkan oleh Wirth (1980). Interaksi sosial diantara para pendatang dari desa di satu sisi dan interaksi pendatang dengan penduduk asli kota pada sisi yang lain, telah menimbulkan bentuk kebudayaan yang unik. Ditambah "*brain washing*" kapitalisme lewat iklan di televisi dan gaya hidup lainnya, pertumbuhan megaurban tidak saja menarik diamati secara ekonomis, namun juga secara sosial. Istilah *urbanism as a way of life* nampaknya memperkaya pemahaman tentang perilaku mobilitas yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi belaka namun juga terkait interaksi sosial. Keberadaan seseorang dalam lingkungan baru, misalnya penduduk desa yang bermigrasi ke kota, mengharuskan mereka melakukan penyesuaian baru, ada kebudayaan asal yang

harus dipertahankan dan ada sifat-sifat baru yang harus dibangun. Perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, dan latar belakang kebudayaan akan terus berinteraksi.

Proses reproduksi kebudayaan asal akan terus berjalan untuk pencarian identitas, sementara kota akan memberikan pilihan yang boleh jadi akan menjauhkan mereka dari ciri kebudayaan asal di perdesaan. Bagi mereka yang tidak siap, maka akan terjadi kebingungan dalam pencarian identitas karena kebudayaan kota yang plural dan terdiferensiasi. Apalagi, menurut Gilbert dan Gugler (1996) bahwa ideologi pembangunan kota merupakan perwujudan konflik antar-kelas. Penentuan tata ruang kota hanya dapat dipahami dari proses konflik dan beroperasinya sistem kapitalisme ini. Wajar pula jika unjuk rasa, bentrokan antara satuan polisi pamong praja dengan para pedagang kaki lima, maupun meningkatnya kejahatan di kota-kota besar, dan sebagainya merupakan wujud dari konflik ini.

SIMPULAN

Di Kedungsepur sektor industri menurun perannya, demikian pula sektor pertanian, dan sebaliknya sektor jasa dan usaha mandiri yang semakin meningkat. Di wilayah perdesaan di semua kabupaten di daerah belakang kota Semarang, "urbanisme" diduga kuat telah tumbuh dengan baik karena didukung oleh membaiknya tingkat pendidikan kaum muda di desa serta pe-
brain washing dari televisi, media massa, alat komunikasi HP, dan sebagainya.

Di daerah perdesaan, proporsi pekerja bebas di sektor pertanian malahan lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi pekerja bebas di sektor non-pertanian. Fakta ini menunjukkan adanya perubahan gaya hidup yang mendorong tumbuhnya urbanisasi, dan bukannya industrialisasi. Urbanisasi yang terjadi adalah karena ada peningkatan konsumsi masyarakat terkait "globalisasi" informasi. Di kawasan perdesaan pun sudah terlibat konsumsi global lewat "*brain washing*" dari media massa ter-

utama televisi, untuk memompakan ide-ide tentang citra sebuah produk (*brand image*), nilai, gaya hidup, dan sebagainya, sebagaimana pernah disebut Georg Simmel sebagai "*the metropolis and mental life*", sebagai kelanjutan dari "*urbanism as a way of life*". Lewat manipulasi citra inilah para pebisnis sangat tanggap untuk menciptakan peluang usaha sehingga jaringan mini-market sudah merambah di setiap jengkal lahan di kawasan perdesaan dan kawasan pinggiran kota dan mengubah wajahnya menjadi sebuah "kota" lengkap dengan berbagai sarana dan prasarana pelayanan lainnya. Dengan kata lain, urbanisasi yang terjadi bukan karena meningkatnya daya inovasi masyarakat namun karena meningkatnya gaya konsumtivisme masyarakat (desa dan kawasan pinggiran), dan ini berarti proses difusi budaya konsumtif terjadi dengan cepatnya.

Namun jika ditinjau dari fakta tentang tumbuhnya pekerja bebas di sektor non-pertanian, boleh jadi hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan usaha kewirausahaan. Hanya yang menjadi masalah sampai seberapa jauh inovasi kewirausahaan ini mampu menopang perekonomian rakyat dan menyejahterakan mereka. Tumbuhnya kemandirian masyarakat barangkali juga sebagai respons atas tidak memadainya upah yang diterima jika mereka bekerja di sektor industri. Kenyataan menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran basis ekonomi pertanian ke non-pertanian dan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Implikasi kebijakan yang diambil pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Kedungsepur ini ialah, bagaimana menyikapi suburnya penetrasi pemodal yang terus mengembangkan usahanya sampai ke tingkat desa sebagaimana nampak dari 'serbuan' dua jaringan mini-market besar yang merupakan simbol kekuatan modal. Kekuatan modal besar diduga banyak merugikan masyarakat bawah. Berbagai 'pembakaran' pasar-pasar tradisional menunjukkan hal tersebut, dan ini merupakan gejala awal

untuk menggantikannya dengan 'pasar moderen'. Fakta ini merupakan simbol gejala urbanisasi yang berbasis pertumbuhan ekonomi besar. Selanjutnya secara generalisasi, penelitian ini juga menyarankan kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

Pertama, sudah saatnya kebijakan pembangunan pusat-pusat industri di kota-kota besar yang padat modal ditinjau kembali, dan sebaliknya industri kecil dan menengah yang berbasis pertanian, perlu dikembangkan agar para petani dan buruh tani lainnya juga turut menikmati hasilnya. Fakta bahwa banyaknya unjuk rasa dan kerusakan lingkungan membuktikan bahwa kesejahteraan mereka tidak baik;

Kedua, kebijakan pengembangan usaha-usaha mandiri atau kewirausahaan dan koperasi perlu diprioritaskan. Usaha yang dapat dilakukan di antaranya, program-program pelatihan dan keterampilan manajemen, kredit murah tanpa agunan bagi wirausahawan yang dipandang mampu berkembang, perluasan informasi pasar perdagangan, dan pelibatan wirausahawan dan koperasi di pasar global dengan bantuan instansi/lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- EBadan Pusat Statistik, 1997, *Survai Antar Sensus Indonesia*.
- _____, 2003, *Statistik Indonesia*.
- _____, 2007, *Survai Antar Sensus Indonesia*.
- _____, 2008, *Survai Sosial Ekonomi*.
- _____, 2009, *Statistik Indonesia*.
- _____, 2009, *Demak Dalam Angka*.
- _____, 2007, *Jawa Tengah Dalam Angka*.
- _____, 2007, *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah*.
- _____, 2009, *Jawa Tengah Dalam Angka*.
- Boeke, J.H., 1961, "The Theory of Dualism", dalam Wertheim (eds.), *The Concept of Dualism in Theory and Policy*, Amsterdam, W Van Hoeve Publisher Ltd., hlm. 165-193.

- Brannen, J. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bremner, J. and Bilsborrow. R., 2005, "Population Dynamics and Millennium Development Goal 7", dalam *Paper Prepared for PERN*. University of North Carolina at Chapil Hill. 5-16 September.
- Brown, D. L and Kai A. S., 2002, "Population Decentration in Hungary During the Post-Socialist Transformation", dalam *Journal of Rural Studies*. No.18, hlm. 233-244.
- Cohen, B., 2006, "Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projection, and Key Challenges for Sustainability", dalam <http://www7.Nationalacademic.org/dbase.CitiesTransformedWorldTechnologyInSociEty.Article.pdf>.
- Douglass, M., 1995, "Global Interdependence and Urbanization: Planning for the Bangkok Megaurban Regions" dalam McGee, T. G and I. M. Robinson (eds.), *The Megaurban Regions of Southeast Asia*, Vancouver, the University of British Columbia Press, hlm. 45-77.
- _____, 2000, "Megaurban Regions and World City Formation: Globalization, the Economic Crisis and Urban Policy Issues in Pasific Asia", dalam *Urban Studies* 37 (12), hlm. 15-36.
- Firman, T., 2003, "The Spatial Pattern of Population Growth in Java, Indonesia 1990-2000: Continuity and Change in Extended Metropolitan Region Formation", dalam *The Fifth IRSA International Conference*. Bandung 18-19 Juli.
- Geertz, C., 1963, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*, Chicago: The University Of Chicago Press.

- Gilbert, A. and Gugler, J., 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Ginsburg, N, 1990, *The Urban Transition: Reflections on the American and Asian Experiences*, Hongkong: The Chinese University Press.
- Jones, G.W., 2001, "Studying Extended Metropolitan Regions in South-East Asia", Paper Presented at the XXIV General Conference of the IUSSP. Salvador Brazil 18-24 August, dalam http://www.iussp.org/Brazil_2001/s40/s42.02. Jones.pdf.
- Jawapos, edisi 11 September 2008.
- Latz, G., 1991, "The Persistence of Agriculture in Urban Japan: An Analysis of the Tokyo Metropolitan Area", dalam N. Ginsburg, B. Koppel and T.G. McGee (eds.). *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*. Honolulu: The University of Hawaii Press, hlm. 137-156.
- Laquian, A.A., 2008, "The Planning and Governance of Asia's Mega-Urban Regions" Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nation Secretariat. New York 21-23 January. Diambil dari http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_poDist/p04_Laquian.pdf.
- Light, I., 2001, "Globalization, Transnationalism, and Trade", dalam *Asian and Pacific Migration Journal*. Vol. 10, No. 1, hlm. 53-79.
- Lin, G.C.S. 1994. "Changing Theoretical Perspective on Urbanization in Asian Developing Countries", dalam *Third World Planning Review*. 16, hlm. 1-23.
- Liu, P.K.C and H.H. Tsai, 1991, "Urban Growth and Employment in Taiwan" dalam N. Ginsburg, B. Koppel and T. G. McGee (eds.), *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*. Honolulu: The University of Hawaii Press, hlm. 193-216.
- McGee, T., 1971, *The Urbanization Process in the Third World Exploration In Search of Theory*, London: G. Bell and Son Ltd.
- _____, 1991, "The Emergence of Desa Kota Regions in Asia", dalam N. Ginsburg, B. Koppel and T.G. McGee (Eds), *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Melchert, L., 2005, "The Age of Environmental Impasse? Globalization and Environmental Transformation of Metropolitan Cities", dalam *Development and Change*. Vol. 36, No.5, hlm. 803-824.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Rondinelli, 1984, "Small Towns in Developing Countries: Potential Centers of Growth, Transformation, and Integration", dalam H.D. Kammeir and P.J. Swan (eds.) *Equity With Growth? Planning Perspectives for Small Towns in Developing Countries*. Bangkok: AIT.
- Tyner, J. A., 2002, "The Globalization of Transnational Labor Migration and the Filipino Family: a Narrative", dalam *Asian and Pacific Migration Journal*. Vol. 11 No. 1, hlm. 95-116.
- Wirth, L., 1980, "Urbanism as a Way of Life", Irwan Press and M. Estellie Smith (ed.). *Urban Place and Process*, New York: MacMillan Publishing co., Inc, hlm. 30-48.
- Yixing, Z., 1991, "The Metropolitan Interlocking Region in China: A Preliminary Hypothesis", dalam N. Ginsburg, B. Koppel and T.G. McGee (eds.), *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*. Honolulu: The University of Hawaii Press, hlm. 89-112.